

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ternyata di dalam keuangan pemerintahan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai informasi laporan keuangan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Reformasi dibidang keuangan Negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan Negara tersebut adalah terkait dengan system akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010).

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan selama ini, Negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kelompok profesi manajemen oleh para professional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran kembali pengelolaan

yang baik yang sesuai dengan lingkungan pemerintah. Sistem keuangan daerah yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat di tugas dan Instansi Pemerintah tersebut (PP No. 60 Tahun 2008).

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas (Komalasari, 2016). Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan yang sudah pernah dilakukan adalah penelitian Muid Dul (2014) yang menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Saputro (2017) yang menunjukkan hasil Kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern berpengaruh. Sedangkan, Penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, artinya laporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat Opini lain yang diberikan pemeriksa yaitu : Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Fenomena tentang kualitas laporan keuangan terjadi pada tahun 2009-2013 pada tahun tersebut Provinsi Lampung hanya satu kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

**Daftar Opini BPK atas LKPD Provinsi Lampung
Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Opini
2009	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2010	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2011	WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian- Dengan Paragraf Penjelas)
2012	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan TA 2012 dan Semester I TA 2013, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pemerintah Provinsi Lampung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan belum efektif dan efisien.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah mengungkap pemborosan keuangan daerah atas kemahalan harga senilai Rp.37.234,12 juta, yang terjadi pada 46 entitas salah satunya adalah Provinsi Lampung. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat selisih harga pemenang lelang, perhitungan HPS tidak mempertimbangkan harga material, pemberian tunjangan perumahan serta belanja hibah disalurkan kepada penerima yang sama secara terus menerus.

Pada IHPS Semester II Tahun 2013 BPK menemukan 88 kasus dengan nilai temuan 20.467,75 (dalam juta rupiah) . Total kasus untuk Sistem Pengendalian

Intern 12 Kasus, dengan rincian Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja sebanyak 11 Kasus, Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1 Kasus. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah terdapat 32 kasus dengan nilai temuan 5.732,87 (dalam juta rupiah), mengakibatkan potensi kerugian daerah terdapat 5 kasus dengan nilai temuan 412,49 (dalam juta rupiah), mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 18 kasus dengan nilai temuan 13.956,44 (dalam juta rupiah), ketidakhematan 2 kasus dengan nilai temuan 281,12 (dalam juta rupiah) dan ketidakefektifan sebanyak 2 kasus dengan nilai temuan 438,83 (dalam juta rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung, karena pada rentang tahun 2009 hingga 2013 Provinsi Lampung hanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu kali.

Sistem Akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi yang baik adalah system yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Nurmalia,2016).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah .

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Komalasari (2016), penelitian tersebut menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia. Variabel ini ditambahkan dengan alasan kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam suatu perusahaan atau instansi dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Menurut Roviyantie (2011), Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya harus dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul skripsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : **“ PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN KOMPTENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan yang akan dibahas ini tidak meluas, terarah dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini mengambil sampel seluruh pegawai bagian akuntansi dan keuangan untuk mengisi kuisioner.
2. Dalam penelitian ini, penulis membatasi faktor permasalahan yang memungkinkan terjadinya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah

(SAKD) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas

laporan keuangan daerah, serta menerapkan pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktiknya.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi yang berguna bagi instansi di masa yang akan datang serta diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan akuntabel.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna sebagai referensi serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka ada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajama daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada bab II.

Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan / rancangan / model / alat / teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya tersiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.yang ditemukan. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap